



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASRIDA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 254043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.290.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 589 m2/142 m2 di KAB / KOTA KENDARI, Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 1.800 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA KENDARI, Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/40 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/12 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/12 m2 di KAB / KOTA BUTON, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 205.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 63.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	77.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.635.100.000
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.135.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARINI ABBAS RAHMAN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 276317

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/260 m2 di KAB / KOTA SORONG, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA SORONG, Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 60.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 953.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 953.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.